

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Kabupaten/Kota di Aceh

### *The Influence of Regional Original Income and Regional Expenditure on Financial Information Transparency in Districts/Cities in Aceh*

Shofia Zahrina<sup>1\*)</sup>, Azlina<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Analisis Keuangan, Politeknik Kutaraja  
email: [shofiazahrina0@gmail.com](mailto:shofiazahrina0@gmail.com), [azlina@poltekkutaraja.ac.id](mailto:azlina@poltekkutaraja.ac.id)

\*Correspondence

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Riwayat Artikel:</i> Diterima: 1 Juni 2025 Direvisi: 20 Juni 2025 Dipublikasikan: 30 Juni 2025</p> <p><i>Nomor DOI</i> 10.47647/jeko.v%vi%i.3189</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i> Zahrina, S., &amp; Azlina, A (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Kabupaten/Kota di Aceh. <i>Jurnal Ekobismen</i>, 5 (2), 223-234</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan <i>Common Effect Model</i> yang dipilih berdasarkan uji <i>Chow</i>, <i>Hausman</i>, dan <i>Lagrange Multiplier</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah sedangkan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan. Secara simultan, PAD dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan PAD penting namun transparansi lebih dipengaruhi oleh belanja daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada publik.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Transparansi Informasi Keuangan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Abstract</i></p> <p><i>This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Regional Expenditure on Transparency of Regional Financial Information in districts / cities in Aceh Province during the period 2020-2023. Using a quantitative approach with secondary data obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. Data analysis was carried out using panel data regression with the Common Effect Model. Model selected based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results showed that PAD had no significant effect on the transparency of regional financial information, Regional Expenditure had a positive significant effect. Simultaneously, PAD and Regional Expenditure together have a significant effect on the transparency of regional financial information. This shows that although increasing PAD is important, transparency is more influenced by regional expenditures that are managed and published to the public.</i></p> <p><i>Keywords:</i> Regional Original Revenue, Regional Expenditure, Transparency of Financial Information.</p>

## **PENDAHULUAN**

Transparansi informasi keuangan merupakan salah satu kewajiban yang paling penting dalam penyampaian informasi keuangan. Dalam konsep transparansi mengungkapkan keterbukaan dan kejelasan dalam menyampaikan suatu informasi keuangan kepada publik yang sangat penting untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. (Indonesia, 2010) Undang-Undang No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan bahwa laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat dengan mudah memahami dan mengakses informasi tersebut. Transparansi informasi itu terbagi dua yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dimana ketersediaan merupakan suatu informasi harus ada dan mudah di akses oleh publik, sedangkan aksesibilitas merupakan seberapa mudah masyarakat mengakses informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal pengungkapan informasi terhadap laporan keuangan mempunyai keputusan yang sangat berdampak dalam pengambilan keputusan (Fauziah, 2020).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, hal yang sangat penting dalam transparansi keuangan agar membangun kepercayaan dalam laporan keuangan yang disajikan, memberikan keputusan informasi yang lebih baik, akurat dan mudah di akses oleh masyarakat, dan mengurangi risiko korupsi yang menyalahgunakan sumber daya publik (Dezalinda & Afriyenti, 2024). Fenomena yang terjadi di Aceh pada transparansi dalam menanggapi penyalahgunaan wewenang di salah satu kabupaten/kota di Aceh bahwa ada hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap transparansi keuangan yang di lansir dari (Jamaluddin, 2025). Dengan adanya penyalahgunaan wewenang berupa penyuaipan atau pemerasan terhadap pemerintah dapat memberikan dampak merugikan bagi perekonomian dan merupakan tindakan melawan hukum. Tujuan utama tranparansi memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi dimana dengan adanya data transparan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan pertanggungjawaban jika tidak sesuai dengan Undang-Undang. Transparansi informasi keuangan daerah yang wajib dipublikasikan secara baik atau utuh dan konsisten pelaporannya adalah setiap tahun (Putri & Setiawan, 2022).

Dalam penelitian ini memiliki dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang dihasilkan berdasarkan peraturan yang ada di daerah dimana pendapatan sangat vital di pemerintah daerah. (Aulia, 2022) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), telah mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan PAD dengan menindak Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Setelah melakukan tindakan tertentu dalam meyakini sepanjang bulan September, pemerintah menemukan bahwa sebagian WP tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Pemko Banda Aceh menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polresta dan Satpol PP untuk melakukan penindakan yang tegas dan terukur, mulai dari penyegelan usaha hingga penyitaan aset, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Belanja daerah merupakan informasi yang sangat penting untuk di publish dimana dalam pelaporan belanja daerah terdapat gambaran tentang pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah yang digunakan, dan menjaga atau meningkatkan terhadap masyarakat daerah, dimana menurut

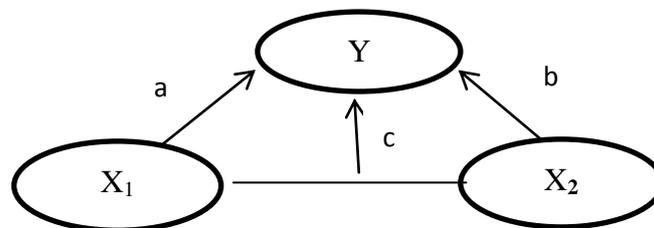
(Indonesia, 2020) Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Salam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya kemajuan pemerintah Provinsi Aceh dalam mendorong perekonomian daerah pada pembelian produk di daerah pada kontribusi masyarakat yang diproduksi sendiri, yang dikatakan oleh (putri rizqa leony, 2022). Belanja daerah terbagi dua yaitu belanja daerah langsung dan belanja daerah tidak langsung dimana setiap bentuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu wajib dilaporkan atau di publish kepada masyarakat.

Adapun untuk mengatasi permasalahan kurangnya transparansi informasi keuangan daerah yang masih ditemukan di beberapa kabupaten/kota di Aceh, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah memengaruhi tingkat transparansi tersebut. Dengan mengidentifikasi variabel mana yang berkontribusi secara signifikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan pentingnya PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal dan belanja daerah sebagai bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah kepada publik, maka penelitian ini mengembangkan dua hipotesis utama sebagai berikut:

- (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
- (H2): Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
- (H3): Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Diolah untuk artikel ini

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada angka-angka dan perhitungan statistik untuk menguji populasi atau sampel pada suatu hipotesis penelitian. (Somad et al., 2023) Metode kuantitatif akan mendapatkan hasil dalam pengukuran yang lebih akurat dalam analisa data, sehingga data yang berfokus pada angka-angka tersebut dapat diolah menggunakan metode statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) di Kabupaten/Kota di Aceh mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Transparansi informasi keuangan daerah merupakan prinsip keterbukaan pemerintah terhadap publik dalam penyelenggaraan atau kebijakan keuangan sehingga publik dapat mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Aceh dengan menggunakan metode teknik sampling sensus diperoleh

sampel sejumlah 92 sampel dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh dengan periode 4 tahun (2020-2023). Teknik analisis data dalam penelitian ini agar mengetahui seberapa pengaruh PAD dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah, untuk menganalisisnya menggunakan regresi data panel dengan menggunakan Eviews 13 agar mempermudah dalam menganalisis data. Penelitian ini mengawali dengan pengumpulan data dari variabel independen dan variabel dependen. menganalisis dengan regresi data panel untuk mengetahui seberapa signifikansi antara hubungan Transparansi Informasi Keuangan Daerah dengan PAD dan Belanja Daerah. Berikut model regresi data panel :

$$TIK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 BD_{it} + \varepsilon_{it}$$

(Dana et al., 2022)

Keterangan:

- TIK : Transparansi Informasi Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Aceh
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BD : Belanja Daerah
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi dari variabel independen
- $\varepsilon$  : Error
- $i$  : Unit Cross Section (kabupaten/kota di Aceh)
- $t$  : Periode waktu (data time series tahun 2020-2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Hasil uji chow dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.370040	(22,67)	0.1631
Cross-section Chi-square	34.175201	22	0.0471

Sumber : Output Eviews 13 diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas (*Chi-square*) = 0,0471 lebih kecil dari 0,05 jika tingkat signifikansi dibandingkan dengan  $\alpha=5\%$ . Sehingga uji chow menunjukkan model terbaik adalah *common effect model*.

### Uji Hausman

Uji hausman untuk membandingkan model antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Berikut hasil uji hausman :

**Tabel 2. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.420698	2	0.0004

Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas = 0,0004 lebih kecil dari 0,05 jika di uji dengan hipotesis statistik. Maka uji hausman memilih model *fixed effect* lebih tepat dari pada *random effect*.

### Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih baik dari pada *common effect*. Maka hasil uji LM sebagai berikut:

**Tabel 3. Uji LM**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.533660 (0.2156)	4.922393 (0.0265)	6.456053 (0.0111)
Honda	-1.238410 (0.8922)	2.218647 (0.0133)	0.693132 (0.2441)
King-Wu	-1.238410 (0.8922)	2.218647 (0.0133)	1.652277 (0.0492)
Standardized Honda	-1.033889 (0.8494)	3.982200 (0.0000)	-2.952199 (0.9984)

Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji LM probabilitas yang didapatkan *Breusch-Pagan (cross-section)* adalah 0, 2156 lebih besar dari 0,05. Maka model yang tepat dalam pengujian penelitian ini menggunakan *common effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow , Uji Hausman dan Uji LM. Maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *common effect model (CEM)*.

### Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih pada penelitian ini adalah *common effect model (CEM)*, sehingga uji asumsi klasik harus digunakan. Dalam uji asumsi klasik pada data panel ini maka cukup uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2019).

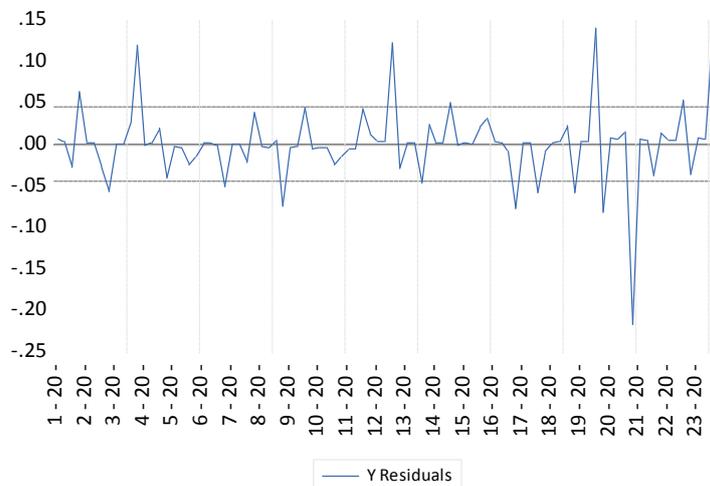
**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
X <sub>1</sub>	1.000000	0.274453
X <sub>2</sub>	0.274453	1.000000

Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan korelasi X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> sebesar 1,000000 merupakan nilai normal. X<sub>2</sub> dan X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>1</sub> sebesar 0,274453 lebih kecil 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa uji multikolinieritas tidak bermasalah, dan dapat melakukan uji Heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

**Gambar 2**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Residual**



Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan hasil gambar grafik diatas, maka dapat disimpulkan residual memiliki nilai naik-turun disekitaran angka nol (garis biru) dan sebagian besar residual yang dihasilkan berada dalam batas wajar kurang lebih dari 0,05 atau tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Regresi Data Panel (Common Effect Model)**

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = -0,078-0,004.X_1+1,013.X_2$$

Sumber : Output Eviews 1 (diolah, 2025)

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan dari setiap koefisien sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta (Intercept) = -0,078 menunjukkan bahwa jika nilai variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> adalah 0, maka nilai Y diprediksi sebesar -0,078. Artinya, dalam kondisi tanpa pengaruh dari variabel independen, nilai dasar dari Y adalah -0,078. Namun, secara substantif, kondisi ini jarang terjadi dalam praktik, sehingga konstanta lebih berfungsi sebagai titik awal prediksi model.

- b. Nilai Koefisien  $X_1 = -0,004$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel  $X_1$  dengan asumsi  $X_1$  tetap (ceteris paribus), akan menyebabkan penurunan pada variabel Y sebesar 0,004. Dengan kata lain, variabel  $X_1$  berpengaruh negatif terhadap variabel Y.
- c. Nilai Koefisien  $X_2 = 1,013$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel  $X_2$ , dengan asumsi  $X_2$  tetap, akan menyebabkan kenaikan pada variabel Y sebesar 1,013. Artinya, variabel  $X_2$  berpengaruh positif terhadap variabel Y.

Kesimpulan dari di atas model regresi ini menunjukkan bahwa variabel  $X_1$  memiliki pengaruh positif terhadap Y, sedangkan  $X_2$  memiliki pengaruh negatif terhadap Y.

### Pengujian Hipotesis Penelitian

#### Uji t

**Tabel 5. Uji t**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/02/25 Time: 21:45  
 Sample: 2020 2023  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.078347	0.093757	-0.835644	0.4056
$X_1$	-0.003597	0.003952	-0.910009	0.3653
$X_2$	1.013223	0.013771	73.57537	0.0000

Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, pengaruh variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:

- a. Hasil uji t pada PAD ( $X_1$ ) sebesar  $-0,910009 < t$  tabel yaitu 1.986674541 dan nilai probability  $X_1$   $0,3653 > 0,05$ . Maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima artinya  $X_1$  tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
- b. Hasil uji t pada Belanja Daerah ( $X_2$ ) sebesar  $73,57537 > t$  tabel yaitu 1.986674541 dan nilai probability  $X_2$   $0,0000 < 0,05$ . Maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

#### Uji F

**Tabel 6  
 Uji F**

R-squared	0.984927
Adjusted R-squared	0.984588

---

S.E. of regression	0.044924
Sum squared resid	0.179619
Log likelihood	156.4383
F-statistic	2907.729
Prob(F-statistic)	0.000000

---

Sumber : Output Eviews 13 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, nilai F hitung sebesar 2907,729 > f tabel yaitu 3.098869718 dan nilai sig. 0,000000 < 0,05. Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya variabel PAD dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan Informasi Daerah.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 7**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

---

R-squared	0.984927
Adjusted R-squared	0.984588
S.E. of regression	0.044924
Sum squared resid	0.179619
Log likelihood	156.4383
F-statistic	2907.729
Prob(F-statistic)	0.000000

---

Sumber : Output Eviews 1 (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,984927 ( 98,4927% ). Maka nilai koefisien determinasi menunjukkan variabel independen yang terdiri PAD dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa transparansi informasi keuangan daerah sebesar ( 98,4927% ) dan sisanya ( 100 – nilai adjusted R Square ) yaitu 1, 5073%.

Hasil Uji Hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap transparansi informasi keuangan daerah**

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa nilai t-statistik 0,910009 dan nilai probability sebesar 0,3653 > 0,05%. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah, artinya besar atau kecil PAD yang diterima oleh daerah tidak menentukan secara langsung bahwa tingkat transparansi informasi keuangan daerah, dan dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Azis & Hapsari, 2020) dan (Nurbaiti Fawziah & Indra Arza, 2020) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan, meskipun adanya PAD yang tinggi maka tidak dapat mendorong pemerintahan daerah agar lebih transparan dalam pelaporan informasi kepada publik, maka PAD menunjukkan bukti bahwa tidak setiap hubungan langsung antara besarnya PAD yang didapatkan dengan tingkat transparansi keuangan daerah.

Selain itu, transparansi informasi keuangan daerah dapat dipengaruhi berbagai penyebab seperti sistem pengelolaan yang ada di pemerintahan, berkurangnya SDM di instansi pemerintahan, dan kurangnya tingkat pengawasan dari legislatif kepada masyarakat daerah. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa transparansi informasi keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh PAD, tetapi juga dari penyebab-penyebab yang lebih besar.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah**

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar 73,57537 dan nilai probabilitas  $X_2$  yang didapatkan sebesar  $0,0000 < 0,05\%$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Semakin besar Belanja Daerah yang direalisasikan, maka semakin tinggi tingkat transparansi kepada masyarakat. Belanja Daerah merupakan informasi yang sangat penting untuk dipublikasikan, karena Belanja Daerah daerah menyajikan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat seperti, meningkatkan kualitas kehidupan yang diperlukan masyarakat apalagi yang berada di daerah terpencil, kurang berkembang, dan fasilitas sosial. Dengan adanya transparansi dalam Belanja Daerah maka dapat memberikan pembuktian atas pengelolaan dan tanggungjawab yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat daerah.

Selain itu, transparansi juga sangat penting dalam bentuk akuntabilitas publik karena dapat memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. penelitian ini sejalan dengan (Sarumaha et al., 2024) dan (Masra & Sari, 2020) dimana tingginya Belanja Daerah maka akan memberikan kontribusi yang positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian, publikasi informasi terbuka melalui website resmi pemerintahan maka dapat meningkatkan kepercayaan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah**

Berdasarkan pada tabel F sebesar 2907,729 dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar  $0,000000 < 0,05$ . Dengan nilai yang didapatkan, maka PAD dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah di Kab/Kota di Aceh. PAD yang tinggi dapat menunjukkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuka informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan pendapatan tersebut. Sementara itu, belanja daerah yang besar juga memerlukan transparansi agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik, memastikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah, pemerintah kabupaten/kota di Aceh perlu memperkuat pengelolaan PAD dan belanja daerah dengan akuntabilitas yang baik, karena keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah.

## **KESIMPULAN**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah di Kab/Kota di Aceh. Temuan

peneliti melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan menganalisa data yang telah di uji. Hasil diperoleh menggunakan analisis regresi data panel dan perangkat pengolahan data menggunakan Eviews 13 yang menghasilkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah dan variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dan hasil saat bersamaan PAD dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah di Kab/Kota di Aceh. Ini menunjukkan bahwa tingginya PAD tidak menjamin meningkatnya transparansi informasi keuangan daerah di Kab/Kota di Aceh, diperlukan transparansi dalam sumber, pemungutan dan penggunaan dari PAD. Alokasi penggunaan anggaran dapat meningkatkan transparansi pada Belanja Daerah. Masih diperlukan pengelolaan informasi keuangan daerah yang lebih terbuka terkait PAD dan belanja daerah terutama yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat melalui website resmi atau publikasi rutin yang mudah diakses oleh publik sehingga masyarakat mendapat informasi yang lebih transparan dan akurat. Peningkatan control dan pengawasan perlu dilakukan melalui regulasi dan SOP mengenai pendapatan dan belanja yang tepat dan juga pengawasan dari lembaga terkait seperti BPK, Inspektorat, lembaga legislatif sebagai wakil masyarakat.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa upaya meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan PAD dan belanja daerah yang optimal. Ketika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menginformasikan pengelolaan pendapatan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sementara itu, tingginya belanja daerah memerlukan transparansi agar masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana secara efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Aceh untuk memperkuat kebijakan transparansi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan partisipatif. Selain itu, bagi akademisi, temuan ini dapat menjadi referensi untuk memahami hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan praktik transparansi keuangan, serta membuka ruang analisis lebih lanjut terkait faktor lain yang dapat memengaruhi transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Peningkatan PAD perlu dibarengi dengan keterbukaan informasi terkait sumber pendapatan, penggunaan, serta capaian yang diraih dari pendapatan daerah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk mengelola belanja daerah secara efisien dan transparan, dengan menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai alokasi dan realisasi belanja daerah, baik melalui website resmi pemerintah daerah, laporan publik, maupun papan informasi di kantor pemerintahan. Disarankan pula agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Hal ini bertujuan agar informasi keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti tingkat partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta kualitas pengawasan internal sebagai faktor yang dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah. Penelitian juga dapat

menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggambarkan tren hubungan antara PAD, belanja daerah, dan transparansi informasi keuangan daerah secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan kualitatif juga dapat dilakukan untuk menggali faktor-faktor lain yang memengaruhi transparansi dari perspektif praktisi dan masyarakat sebagai pihak penerima informasi keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia. 2022. *Pemko Banda Aceh akan lakukan tindakan tegas untuk selesaikan PAD tertunggak*. Views. <https://bpbk.bandaacehkota.go.id/2022/10/pemko-banda-aceh-akan-lakukan-tindakan-tegas-untuk-selesaikan-pad-tertunggak/>
- Azis, I., & Hapsari, D. W. 2020. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018). *E-Proceeding Of Management*, 7(2), 3262–3269.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. 2019. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Dana, D. A. N., Khusus, A., & Belanja, T. 2022. *AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON REGIONAL EXPENDITURES OF DISTRICT / CITY*. 1113–1126.
- Dezalinda, S., & Afriyenti, M. 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(2), 540–550. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1502>
- Fauziah, I. N. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via website*.
- Indonesia, R. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Indonesia, R. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Jamaluddin. 2025. *polda aceh pastikan transparansi dalam menanggapi dugaan penyalahgunaan wewenang di polres bireuen*. Inewsportalaceh.Id. <https://portalaceh.inews.id/read/556119/polda-aceh-pastikan-transparansi-dalam-menanggapi-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-di-polres-bireuen>
- Masra, E. A., & Sari, V. F. 2020. Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Napitupulu, J. H., Ellyawati, N., & Astuti, R. F. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 138–144. <https://doi.org/10.26740/jupe.v9n3.p138-144>
- Nurbaiti Fawziah, I., & Indra Arza, F. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2200–2213. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207>
- Putri Rizqa Leony. 2022. *pemprov aceh jadi daerah kedua terbesar kontribusi belanja produk*

---

*dalam negeri*. Inews.Id. <https://aceh.inews.id/berita/pemprov-aceh-jadi-daerah-kedua-terbesar-kontribusi-belanja-produk-dalam-negeri>

- Putri, W., & Setiawan, M. A. 2022. Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Sarumaha, A. Y., Andriani, W., Mustika, R., & Zahara, Z. 2024. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah dan Opini Audit terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1881. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2085>
- Somad, F. H., Naz'aina, N., Khaddafi, M., & Razif, R. 2023. Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>